

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korporasi modern akan tetap eksis dan mendominasi kehidupan ekonomi jika memiliki dua kombinasi yaitu *asset in place (tangible asset)* dan *investment opportunities (intangible asset)*. Kedua kombinasi tersebut dapat mempengaruhi struktur modal dan nilai perusahaan. Selain itu, instrumen tersebut juga akan munculkan dan mengeksploitasi kesempatan investasi (Arifin: 209). Jika kesempatan investasi ini tidak dieksekusi, maka aktivitas ekonomi hanya terbatas pada jual beli bahan, modal dan tenaga kerja. Padahal aktivitas ini sudah jenuh, penuh kompetisi, dan hanya menghasilkan keuntungan yang minimal. Sedangkan pendorong utama ekonomi modern adalah eksploitasi teknologi baru dan transfer proses produksi menjadi lebih *capital intensive*. Pemanfaatan dan eksekusi kesempatan investasi hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki sumber daya keuangan, teknik dan sumber daya manusia yang memadai.

Krisis keuangan global telah berdampak pada perekonomian dunia. Indonesia sebagai negara yang terkena imbas dari krisis keuangan global. Efek negatif dari krisis keuangan global ini yaitu omzet manufaktur mengalami penurunan, kerusakan infrastruktur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sulitnya tambahan likuiditas modal kerja, dan masih rumitnya proses birokrasi menjadi kendala utama penurunan aktivitas perdagangan. Keadaan ini bisa turut berperan memangkas pendapatan negara. Berdasarkan informasi

sejumlah asosiasi usaha, mayoritas industri yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan omzet adalah sektor industri berbasis ekspor, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), industri hasil hutan, kayu olahan dan furnitur, elektronik, alas kaki, pulp dan kertas, sarung tangan karet, dan minyak sawit mentah. (www.Inaplas.org, 2008 di akses tgl 7 April 2014)

Pada perusahaan yang *go public* di Indonesia lebih konservatif dalam melakukan kebijakan dividen. Ini di akibatkan karena perlambatan ekonomi akibat krisis global yang mempengaruhi investasi perusahaan baik dari segi penerbitan saham maupun obligasi. Kata Rahmat Waluyanto”, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan. Di tahun 2010 ini terdapat sekitar 11 triliun obligasi yang jatuh tempo yang yang harus dibayarkan. Begitu pula untuk para shareholders menuntut untuk dibagikan dividen. (www.kontan.co.id di akses tanggal 07 April 2014)

Melihat hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya banyaknya obligasi yang jatuh tempo. Mengingat periode tersebut perusahaan manufaktur mengalami kendala keuangan adanya krisis global yang semakin memperparah kondisi financial perusahaan sehingga banyak perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi.

Berkaitan dengan masalah pendanaan, perusahaan dapat memperoleh dari dua sumber, pertama dari perusahaan itu sendiri, seperti penerbitan saham dan laba ditahan; kedua dari luar perusahaan, berupa hutang kepada pihak ketiga yang sangat ditentukan oleh kebijakan pendanaan oleh satu perusahaan. Sebesar apapun sebuah perusahaan agaknya kebijakan pendanaan dari luar perusahaan berupa

hutang akan menjadi pilihan strategis. Namun, bukan berarti kebijakan ini tidak mengandung risiko. Ada kondisi yang dapat muncul dari kebijakan tersebut yaitu munculnya konflik keagenan. Dalam perspektif teori keagenan terjadinya konflik antara agen dan *principal* dilatarbelakangi adanya asimetri informasi. Agen yang mempunyai informasi yang lebih banyak melakukan tindakan oportunistik yang menguntungkan dirinya sendiri. Dilain pihak *principal* yang merasa memiliki informasi yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pihak agen menuntut adanya kontribusi yang tinggi. Konflik utama terjadi ketika *principal* menerima pembayaran kas dengan jumlah yang lebih kecil.

Menurut Nasih dan Robith (2011) menyatakan Pada kasus penentuan hutang perusahaan, masalah yang muncul adalah konflik antara *shareholder* dan *bondholder*. Sesuai dengan teori agensi, lazimnya konflik terjadi antara *principal* atau pemilik dengan agensi atau manajemen. Konflik *bondholder shareholder* berbeda dengan konflik agensi tersebut. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tentang pembayaran dividen. Biasanya dalam hal ini *shareholder* menuntut perusahaan membagikan dividen yang tinggi sebagai hasil investasinya, sebaliknya *bondholder* menuntut perusahaan untuk tidak membayarkan dividen berlebihan agar tersedia jaminan/asset cukup untuk pembayaran hutang. *Shareholder* melalui serta bersama-sama dengan manajemen juga memiliki insentif untuk melakukan transfer kesejahteraan melalui pembayaran dividen. Kondisi tersebut menyebabkan *bondholder* kehilangan jaminan pelunasan hutang yang berpotensi meningkatkan risiko tidak terbayar sehingga akan memperbesar potensi konflik *bondholder shareholder*. Sedangkan dilihat dari tingkat risiko

yang dihadapi, ketika *shareholder* melalui manajemen menjalankan aktivitas dengan risiko yang tinggi, maka tingkat risiko yang dihadapi *bondholder* jauh lebih tinggi daripada *shareholder*, (Hanafi, 2005).

Konflik *bondholder shareholder* timbul pada saat perusahaan mencari pendanaan dari hutang. Masalah yang timbul antara lain adalah seputar kebijakan dividen (Jensen-Meckling, 1976: dalam Dahlia Sari 2004). Pembayaran dividen yang terlalu tinggi akan menyebabkan ancaman bagi *debtholder* karena akan mengurangi aktiva yang seharusnya tersedia untuk pelunasan hutang. Untuk mengatasi masalah ini, *debtholder* biasanya akan mensyaratkan pembatasan pembayaran dividen. Smith and Warner (1979) dalam Dahlia, (2004) menyatakan bahwa di dalam kontrak hutang, pembayaran dividen dibatasi oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Menurut Ahmed *et al.* (2002) dan Sari (2004), untuk mengefektifkan kontrak hutang, *bondholder* mensyaratkan perusahaan yang berhadapan dengan konflik *bondholder shareholder* menggunakan akuntansi konservatif. Konservatisme akuntansi dapat membatasi pembayaran dividen yang dilakukan manajemen, kecuali dalam kondisi pembayaran dividen sangat rendah. Menurut Hille (2011), dalam kondisi pembayaran dividen rendah, penggunaan akuntansi konservatif tidak berpengaruh dan atau mampu mengatasi konflik *bondholder shareholder*. Penggunaan akuntansi konservatif ditandai dengan munculnya akrual negatif yang dihasilkan dari penundaan pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan kerugian (Givoly dan Hayn, 2000). Perusahaan akan lebih cepat mengakui biaya-biaya dan menunda pengakuan terhadap pendapatan-pendapatan. Akibatnya nilai

perusahaan turun karena rendahnya laba dan berpengaruh pada keterbatasan fleksibilitas pendanaan (Lee, 2010).

Konservatisme berperan dengan melaporkan laba yang rendah sehingga dapat menekan insentif manajer dan *shareholder* untuk melakukan transfer kesejahteraan dengan cara pembagian dividen berlebih. *Bondholder* juga akan meminta perusahaan menggunakan akuntansi konservatif ketika konflik *bondholder shareholder* semakin tinggi.

Manurut Nasih dan Robith (2011) struktur kepemilikan perusahaan, manajer dan pemegang saham memiliki kepentingan yang sama terhadap nilai perusahaan dan bertentangan dengan kepentingan *bondholder*. Oleh karena itu, mereka cenderung memaksimalkan kesejahteraan dengan melakukan transfer kesejahteraan dari *bondholder*.

Lasdi (2008) menyatakan bahwa salah satu hal yang mendorong manajer untuk menerapkan prinsip akuntansi konservatif adalah adanya konflik antara pemegang saham dengan pemegang obligasi berkaitan dengan hutang. Hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Menurut Lasdi (2008), pengambilan keputusan akan penggunaan hutang harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya *leverage* keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemagan saham biasa. Sari (2004) menyatakan bahwa konflik dalam perusahaan dapat terjadi antara pemegang saham dengan pemegang obligasi (konflik *Bondholder-Shareholders*). Konflik

tersebut terjadi ketika perusahaan berusaha mencari pendanaan dari hutang. Pembayaran dividen yang terlalu tinggi akan mengancam kepentingan pemegang obligasi karena akan mengurangi aktiva yang seharusnya digunakan untuk pelunasan hutang. Dalam konteks kontrak hutang, jumlah dividen yang dibayarkan akan dibatasi oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Juanda (2007) menyatakan bahwa salah satu determinan yang dapat menjelaskan adanya variasi praktik konservatisme antar perusahaan adalah adanya konflik kepentingan antara investor dan kreditor. Konflik kepentingan di antara mereka dapat terjadi karena investor berusaha mengambil keuntungan dari dana kreditor melalui pembayaran dividen yang berlebihan, transfer aktiva, perolehan aktiva, dan penggantian aktiva. Sementara itu, pihak kreditor mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya dimasa mendatang. Untuk menghindari transfer kekayaan yang dilakukan pihak investor, maka pihak kreditor menginginkan pelaporan keuangan yang konservatif.

Dalam membatasi adanya transfer kesejahteraan dan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan, maka perlu adanya mekanisme kontrak utang. Mekanisme kontrak yang efisien menekankan pada penggunaan kebijakan akuntansi konservatif. Ahmed *et al* (2002) berpendapat bahwa kontrak akan lebih efektif dengan menggunakan akuntansi konservatif. Midiastuty dan Mas'ud (2003) juga menyimpulkan bahwa konflik dapat diatasi dengan meningkatkan kepemilikan institusional.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan membuat kontrol eksternal terhadap perusahaan menjadi semakin kuat. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap para manajer sehingga dapat menekan biaya agensi (*agency cost*). Perusahaan dengan tingkat *agency cost* yang rendah cenderung akan membagikan dividen dalam jumlah yang kecil.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasrizal, Kamaliah dan Tika (2009) tentang analisis pengaruh *free cash flow*, kebijakan dividen, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham institusional terhadap kebijakan hutang. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasih dan Robith (2011) tentang konservatisme akuntansi dan konflik *bondholder shareholder* pada perusahaan non keuangan terdaftar di bursa efek Indonesia yang menunjukkan hasil kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2004) tentang hubungan antara konservatisme akuntansi dengan konflik *bondholder shareholder* seputar kebijakan dividend an peringkat obligasi. Hasil menunjukkan leverage (LEV) menunjukkan hubungan negative yang signifikan dengan konservatisme.

Perusahaan *non* keuangan merupakan industri yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Banyaknya perusahaan dalam industri tersebut dan didorong dengan kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan *non*

keuangan. Persaingan dalam industri *non* keuangan tersebut membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerjanya guna mencapai tujuan perusahaan semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai masalah yang dirumuskan dalam judul ***“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Institusional Terhadap Konflik Bondholder Shareholder Pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2012”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. pada kasus penentuan hutang perusahaan, masalah yang muncul adalah konflik antara *shareholder* dan *bondholder*. Sesuai dengan teori agensi, lazimnya konflik terjadi antara principal atau pemilik dengan agensi atau manajemen. Konflik *bondholder shareholder* berbeda dengan konflik agensi tersebut. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tentang pembayaran dividen.
2. Konservatisme berperan dengan melaporkan laba yang rendah sehingga dapat menekan insentif manajer dan *shareholder* untuk melakukan transfer kesejahteraan dengan cara pembagian dividen berlebih. *Bondholder* juga akan meminta perusahaan menggunakan akuntansi konservatif ketika konflik *bondholder shareholder* semakin tinggi.

3. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan membuat kontrol eksternal terhadap perusahaan menjadi semakin kuat. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap para manajer sehingga dapat menekan biaya agensi (*agency cost*). Perusahaan dengan tingkat *agency cost* yang rendah cenderung akan membagikan dividen dalam jumlah yang kecil.

C. Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas yaitu, konservatisme akuntansi, dan kepemilikan institusional. Peneliti memilih variabel tersebut karena variabel-variabelnya saling berkaitan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap konflik *bondholder shareholder*.
2. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan *non* keuangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah di audit selama periode pengamatan yaitu tahun 2010 – 2012 dan perusahaan yang memiliki saham kepemilikan institusional selama 3 tahun berturut-turut.
3. Konflik *bondholder shareholder* yang menjadi topik penelitian ini adalah konflik seputar kebijakan hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Konflik timbul karena semakin besar hutang perusahaan, maka akan semakin besar pula klaim *bondholder* terhadap aktiva perusahaan. Hal ini akan

memperbesar konflik *bondholder shareholder* karena *bondholder* tidak ingin adanya kelebihan pembayaran untuk *shareholder* yang akan mengakibatkan semakin berkurangnya bagian untuk *bondholders*.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh akuntansi konservatisme terhadap konflik *bondholder shareholder* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012 ?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap konflik *bondholder shareholder* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012 ?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntansi konservatisme dan kepemilikan institusional terhadap konflik *bondholder shareholder* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012 ?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam kegiatan belajar mengajar terkait dengan materi akuntansi konservatisme, kepemilikan institusional, dan konflik *bondholder shareholder*.

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada para perusahaan tentang peran konservatisme akuntansi dan kepemilikan institusional dalam mengatasi konflik antara *bondholder shareholder*.

2. Kegunaan penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang manajemen keuangan, khususnya mengenai konservatisme akuntansi dan kepemilikan institusional dalam mengatasi konflik *bondholder shareholder*.